

PENGUATAN LITERASI POLITIK GEN Z MENUJU *CIVIC SMART* MENJELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SEMARANG

Martien Herna Susanti¹, Anandha,² Sunarto^{3*}

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Universitas Semarang, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Korespondensi : (martien@mail.unnes.ac.id)

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan memberikan penguatan literasi politik Gen Z menuju *civic smart* menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Semarang. Tingginya antusiasme kaum milenial pada Pemilu 2024 diketahui dari Survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama Litbang Kompas yang menunjukkan 86,7 persen menyatakan bersedia berpartisipasi, 10,7 persen masih menimbang, dan 2,6 persen menolak mengikuti Pemilu. Permasalahan mitra adalah minimnya literasi politik Gen Z, khususnya menghadapi Pilkada tahun 2024. Pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan memberikan pemahaman: (1) pentingnya kesadaran Gen Z menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang cerdas (*civic smart*); (2) pemanfaatan *youtube*, *instagram*, *facebook*, dan media komunikasi seperti *whatsap* dan *line* sebagai media literasi politik; (3) mengetahui bahaya *hoaks* dan *black campaign* terhadap demokrasi; dan (4) Gen Z sebagai *agent of change* untuk mewujudkan warga negara terdidik (*educated citizen*). Metode pelaksanaan dibagi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi/refleksi. Hasil akhir kegiatan pengabdian menunjukkan sebanyak 89 persen peserta mampu memahami urgensi literasi politik. Kemampuan mengakses media sosial dan memilah berita sebesar 93 persen, dan kesadaran gen Z sebagai *agent of change* untuk turut berkontribusi mewujudkan warga negara yang terdidik (*educated citizen*) sebesar 87 persen.

Kata kunci: Civic Smart, Literasi Politik Gen Z, Pilkada Serentak Tahun 2024

Abstract

This community service aims to strengthen Gen Z's political literacy toward civic smart ahead of the 2024 simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in Semarang Regency. The high enthusiasm of millennials in the 2024 Election is known from the Kompas Gramedia Media Research and Analysis Team Survey together with Kompas Litbang which showed that 86.7 percent stated that they were willing to participate, 10.7 percent were still considering, and 2.6 percent refused to participate in the Election. The partner's problem is the lack of Gen Z political literacy, especially in facing the 2024 Pilkada. This community service is intended to provide an understanding of (1) the importance of Gen Z's awareness in using their voting rights as smart citizens (*civic smart*); (2) the use of YouTube, Instagram, Facebook, and communication media such as WhatsApp and Line as political literacy media; (3) knowing the dangers of hoaxes and black campaigns against democracy; and (4) Gen Z as agents of change to create educated citizens. The implementation method is divided into three stages, namely preparation, implementation, and evaluation/reflection. The final results of the community service activities showed that 89 percent of participants understood the urgency of political literacy. The ability to access social media and sort news was 93 percent, and the awareness of Gen Z as agents of change to contribute to realizing educated citizens was 87 percent.

Keywords: Civic Smart, Gen Z Political Literacy, Simultaneous Regional Elections in 2024

Submit: Juni 2024

Diterima: Agustus 2024

Publis: November 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Tahun 2024 menjadi tahun penting dalam perjalanan politik Indonesia, karena Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 diselenggarakan serentak di tahun yang sama. Pilpres diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024 sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Disusul Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada Rabu, 27 November 2024 (Wibawana, 2023).

Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak yang diselenggarakan serentak di tahun yang sama menjadi sesuatu yang baru sepanjang Sejarah demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak tidak hanya menyoal terkait masalah waktu, sistem, prosedur, dan mekanisme pemilihan yang berbeda, namun juga meningkatkan tanggung jawab lokal, keadilan politik, dan respons lokal. Untuk memastikan implementasi demokratisasi lokal yang efektif, Pilkada serentak bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan hubungan kuasa berdasarkan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil Pilkada harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Miriam Budiardjo menggambarkan partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta atau berperan secara aktif dalam politik dengan memilih

pemimpin yang memengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung (*public policy*) (Budihardjo, 2007).

Terkait partisipasi politik, hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas diperoleh data tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan gen Z (lahir tahun 1997-2012) untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Data survei menunjukkan sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia berpartisipasi, 10,7 persen masih menimbang, dan 2,6 persen menolak mengikuti Pemilu (Yunita, 2022).

Persentase angka yang menolak berpartisipasi dalam Pemilu tampak kecil, namun jika dikaitkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih, dimana sebanyak 66.822.389 (33,60 persen) merupakan gen milenial dan Z sebanyak 46.800.161 (22,85 persen), maka angka tersebut sangatlah besar. Jumlah pemilih dari dua gen mencapai 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih sebanyak 66.822.389 atau 33,60 persen (Yolency, 2024). Apatisme dalam politik yang terjadi khususnya pada gen Z salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman kritis mereka terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik.

Bahkan disinyalir apatisisme ini kemudian mendorong Gen Z memilih menjadi Golongan Putih (Golput).

Dengan kata lain Golput merupakan cara untuk mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap sistem politik, sebagaimana pendapat Arbi Sanit, bahwa Golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu (Arianto & Ali Haji, n.d.).

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni: 1) Partisipasi politik apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik; 2) Partisipasi politik spectator yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum; 3) Partisipasi politik gladiator yaitu istilah bagi mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis Masyarakat; dan 4) Partisipasi politik pengritik yaitu mereka yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional (Bashori, 2018).

Berdasarkan kategori di atas, maka setidaknya Gen Z masuk dalam partisipasi politik spectator dan gladiator. Gen Z diasumsikan termasuk dalam partisipasi politik spectator, karena mereka memberikan suara sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024. Adapun partisipasi politik gladiator ditunjukkan dengan keterlibatan mereka di media sosial sebagai tim sukses salah satu kandidat atau partai politik dengan target segmentasi Gen Z dan milenial. Sebagaimana diketahui Gen Z terbiasa

menerima arus informasi dari media sosial dan internet (Kusumapradja, 2020). Memberikan pemahaman, bahwa *hoaks* dan *black campaign* berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Memberikan informasi dan pemahaman jumlah pemilih gen Z merupakan mayoritas di Pemilu (Yunita, 2022).

Literasi politik menurut Westholm, dkk (1990) sebagai konsep dan fakta dasar yang merupakan kondisi yang diperlukan untuk memahami isi debat publik. Denver dan Hands (1990) mendefinisikan literasi politik sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik yang memungkinkan masyarakat menjalankan peran mereka sebagai warga negara secara efektif. Selanjutnya Wormald (1988) mengartikan literasi politik adalah pendidikan tentang menentukan pemerintahan sendiri, pemahaman politik, serta prosedur dan tujuan pemungutan suara (Cassel & Lo, 1997).

Literasi politik menurut Zaller (1992) yaitu pemahaman individu terhadap suatu peristiwa politik dan kesadaran politiknya. Literasi politik tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan politik, fungsi-fungsi institusi politik dan pemerintah, namun juga keterampilan dan nilai-nilai politik. Keterampilan yang dimaksud di sini terkait kesempatan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam memengaruhi keputusan publik, kemampuan memahami sudut pandang orang lain, menyadari pengaruhnya terhadap dirinya serta menanggapi secara etis. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diperlukan dalam

kehidupan demokratis yang selanjutnya menjadi gaya hidup (Kus, 2015). Literasi politik yang baik akan menghasilkan *good citizen* atau warga negara yang baik. Yaitu warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, memiliki sikap kritis terhadap kebijakan, taat hukum, serta memiliki kesadaran sosial atau disebut *good citizen*.

Menurut Naula (2019) *good citizen* melibatkan berbagai komponen, termasuk nilai, norma, cita-cita etika, perilaku, dan harapan partisipasi. *Good citizen* juga berkaitan dengan beragam persoalan kontemporer, seperti pola partisipasi politik, makna demokrasi dan hak kemanusiaan, gagasan budaya sipil, persamaan hak, dan peran teknologi dalam era digital (Treviño et al., 2021). Untuk mewujudkannya perlu dilakukan literasi politik, khususnya kepada gen Z sebagai gen penerus bangsa. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini merupakan implementasi dari *Implementation Arrangement* (IA) antara Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang dengan Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: *Pertama*, tahap persiapan. Tahap persiapan yang dimaksud meliputi:

mengurus perijinan dan identifikasi peserta gen Z yaitu gen yang lahir di tahun 1985 sampai dengan tahun 2015 atau yang telah memiliki hak pilih pada tahun 2024. *Kedua*, pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan ini, peserta diberikan materi tentang: (1) pentingnya kesadaran menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang cerdas (*civic smart*); (2) proses dan isu-isu politik menjelang Pemilu dan Pilkada; (3) cara bijak menggunakan youtube, instagram, facebook, dan media komunikasi seperti whatsapp dan line sebagai media literasi politik. Gen Z terbiasa menerima arus informasi dari media sosial dan internet (Kusumapradja, 2020); (4) bahaya *hoaks* dan *black campaign* terhadap disintegrasi bangsa; dan (5) Gen Z sebagai *agent of change* dalam mewujudkan warga negara yang terdidik (*educated citizen*). *Ketiga*, evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi dilaksanakan untuk mengukur sejauhmana informasi telah dipahami oleh peserta. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dideskripsikan gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh tim pengabdian FISIP Unnes merupakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam *Implementation Arrangement* (IA) antara Program Studi Ilmu Politik dengan Pemerintah Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh Kepala Desa Genting Bapak Muhlasin, Sekretaris Desa Genting Bapak Rudi, Perangkat Desa Genting, Babinkamtibmas Desa Genting, serta seluruh anggota Karang Taruna Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang berjumlah 20 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang sekaligus membuka acara pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 7 Sambutan dan Sekaligus Membuka Acara oleh Bapak Muhlasin Kepala Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang

Acara selanjutnya adalah paparan materi oleh narasumber yaitu

Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. Materi sosialisasi diawali dengan informasi terkait latar belakang pentingnya literasi politik bagi generasi Z. *Pertama*, jumlah Hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas diperoleh data tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan gen Z (lahir tahun 1997-2012) untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia berpartisipasi, 10,7 persen masih menimbang, dan 2,6 persen menolak mengikuti Pemilu.

Kedua, isu-isu strategis pada Pemilu 2024 yang meliputi: kesejahteraan masyarakat, kurangnya lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga isu demokrasi dan kebebasan sipil. *Ketiga*, Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi Z dan milenial yang berada di rentang usia 17-39 tahun (60%) dari total pemilih.



Gambar 8 Narasumber Menyampaikan Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebelum beranjak ke materi lebih lanjut, narasumber menyampaikan pertanyaan pemantik terkait materi yaitu literasi politik. Berdasarkan jawaban peserta, diketahui belum semua peserta memahami pengertian literasi politik. Oleh karena itu narasumber memulai sosialisasi dengan menampilkan slide PPT terkait pengertian literasi politik

yaitu pemahaman individu terhadap suatu peristiwa politik dan kesadaran politiknya. Literasi politik mencakup pengetahuan politik, fungsi- fungsi institusi politik dan pemerintah, keterampilan dan nilai-nilai politik (berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam memengaruhi keputusan publik, memahami sudut pandang orang lain, menyadari pengaruhnya terhadap dirinya serta menanggapi secara etis). Literasi politik yang baik akan menghasilkan *good citizen* atau warga negara yang baik. Yaitu warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, memiliki sikap kritis terhadap kebijakan, taat hukum, serta memiliki kesadaran sosial atau disebut *good citizen*.

Setelah peserta memahami pengertian literasi politik, narasumber mengaitkan materi literasi politik dengan Pemilu tahun 2024. Penjelasan narasumber terkait dengan Peraturan KPU Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024. Informasi yang disampaikan kepada peserta adalah *time line* tahapan Pemilu 2024 yang harus diketahui oleh Gen Z sebagai pemilih, yaitu: (1) Pembangunan PPK, PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) 17 April 2024 s.d. 5 November 2024; (2) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, 31 Mei 2024 s.d. 23 September 2024; (3) Pendaftaran Paslon, 27 Agustus 2024 s.d. 21 September 2024; (4) Penetapan Paslon, 22 September 2024; (5) Kampanye, 25

September 2024 s.d. 23 November 2024; (6) Pemungutan suara 27 November 2024.

Narasumber menanggapi pertanyaan fenomena Golput yang disampaikan oleh peserta kegiatan pengabdian. Narasumber menjelaskan pengertian Golput sebelum membahas maraknya ide untuk Golput pada Gen Z, serta dampak Golput yang semakin meluas. Menurut Arbi Sanit, Golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada masalah kebangsaan dan sasaran protesnya adalah Pemilu. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang memilih Golput dalam Pemilu yaitu: Pertama, apatis terhadap politik. Apatitis terhadap politik ini terjadi, Ketika Masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah, politisi, dan partai politik yang dianggap lalai dalam mengemban amanat sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Meluasnya sikap apatis terhadap politik dalam Pemilu akan berdampak signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pemilu akan menghasilkan legitimasi yang lemah terhadap pemerintahan yang terpilih. Apatitis terhadap politik juga dapat merugikan dalam hal penyusunan kebijakan publik. Rendahnya keterwakilan suara masyarakat berdampak pada kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang semakin besar.

Kedua, tidak memahami pentingnya Pemilu. Ketidaktahuan

pentingnya menggunakan hak pilihnya jelas akan merugikan masyarakat hingga lima tahun ke depan. Sebagaimana diketahui Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin yang nantinya diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Partisipasi politik masyarakat, idealnya memastikan, bahwa kelak mereka dipimpin oleh orang yang berintegritas, memiliki kompetensi yang memadai, serta berkomitmen pada kejujuran dan menyejahterakan rakyat. Dengan kata lain, partisipasi politik dalam hal ini memilih adalah memastikan “yang terjelek tidak terpilih”.

Ketiga, tidak ada fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimaksud dapat berupa sarana transportasi yang tidak memadai, fasilitas bagi penyandang disabilitas, atau lokasi TPS yang sulit diakses. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh warga negara juga bisa menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih golput, termasuk sulitnya prosedur untuk pindah TPS bagi para perantau. Dengan adanya ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai, hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas proses demokrasi di Indonesia. Jika masyarakat tidak merasa didukung dengan fasilitas yang memadai, maka bisa menjadi alasan bagi mereka untuk tidak turut serta dalam proses pemilu, yang tentunya akan berdampak pada

legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dengan demikian masyarakat, khususnya Gen Z beranggapan, bahwa keputusan untuk memilih Golongan Putih (Golput) merupakan cara untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap sistem politik. Dampak yang ditimbulkan dari keputusan ini adalah lemahnya literasi politik dampak pada kesadaran warga negara atas hak dan kewajibannya.

SIMPULAN

Partisipasi dalam proses demokrasi merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menyalurkan suara melalui pemilihan umum adalah salah satu cara untuk membuat perubahan yang positif dalam negara. Dengan memilih untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, setiap warga negara dapat berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia. Perlu adanya komitmen bersama untuk melawan apatis politik dan Golput, serta berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Keberlimpahan informasi jelang kampanye memapar khalayak dalam waktu singkat, tersebar luas melintasi strata ekonomi, pendidikan, daerah, bahkan usia. Kemajuan teknologi informasi memudahkan penyebaran pernyataan elite politik, reproduksi pesan, pendistribusian, hingga mampu mempengaruhi opini dan pilihan politik. Literasi politik yang baik akan menghasilkan good citizen atau warga negara yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta anggota Karang Taruna Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang sebagai peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

- Budihardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Retrieved from <https://in.book.as/book/3720225/131009?source=recommend>
- Cassel, C. A., & Lo, C. C. (1997). Theories of political literacy. *Political Behavior*, 19(4), 317–335. <https://doi.org/10.1023/A:1024895721905>
- Kus, Z. (2015). Political Literacy Status of Pre-Service Social Studies Teacher. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 177(July 2014), 197–202. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.383>
- Treviño, E., Carrasco, D., Claes, E., & Kennedy, K. J. (2021). Good Citizenship for the Next Generation: A Global Perspective Using IEA ICCS 2016 Data. In *IEA Compass: Briefs in Education*. Retrieved from <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED615192&site=ehost-live>
- Arianto, B., & Ali Haji, R. (n.d.). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. 2011, 1(1), 51–60.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Kusumapradja, A. (2020). Ini Dia 8 Perbedaan Antara Gen Millennial dengan Gen Z. *Cosmopolitan*. Retrieved from [https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/7/2020/21101/ini-dia-8-perbedaan-antara-gen-millennial-dengan-gen-text=Millennial masih sering dipakai untuk, Gen Millennial dengan Gen Z](https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/7/2020/21101/ini-dia-8-perbedaan-antara-gen-millennial-dengan-gen-text=Millennial%20masih%20sering%20dipakai%20untuk%20Gen%20Millennial%20dengan%20Gen%20Z).
- Yunita, R. K. (2022, April). Mayoritas Kaum Milenial dan Gen Z Antusias Ikuti Pemilu 2024. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-gen-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>.
- Wibawana, W. A. (2023, February). Jadwal dan Tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 Baca artikel detiknews, “Jadwal dan Tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024” selengkapnya <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>. Download Apps Detikcom . *Detiknews*. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan->

[pileg-pilpres-dan-pilkada-2024](#)

Yolency. (2024, January). Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tatanan Politik Baru pada Pemilu 2024. *Situs Resmi Kabupaten Tuban Comment Policy*. Retrieved from <https://tubankab.go.id/entry/peran-penting-gen-z-dan-milenial-menuju-tatanan-politik-baru-pada-pemilu-2024#>